

## **ABSTRAK**

### **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK KESEHATAN WARGA BINAAN (Studi pada Lapas Kelas I Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Yesicha Debora**

Pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, termasuk terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan yang bertanggung jawab menjamin hak-hak dasar warga binaan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, pemenuhan hak kesehatan warga binaan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kondisi overkapasitas, keterbatasan tenaga kesehatan, serta minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, tenaga kesehatan lapas, warga binaan, serta akademisi di bidang hukum pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam menjamin hak kesehatan warga binaan telah dilaksanakan melalui peran normatif, peran faktual, dan peran ideal sebagaimana teori peran Soerjono Soekanto. Secara normatif, pemenuhan hak kesehatan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

*Yesicha Debora*

Pemasyarakatan serta peraturan terkait lainnya. Secara faktual, pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penyediaan klinik lapas, pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, pelayanan promotif dan preventif, serta sistem rujukan ke fasilitas kesehatan luar lapas. Sementara itu, secara ideal Lembaga Pemasyarakatan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh, dan setara dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat umum. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat overkapasitas warga binaan, keterbatasan tenaga kesehatan, belum meratanya kepesertaan jaminan kesehatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan dimana yang menjadi faktor dominan adalah faktor sarana dan fasilitas.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung melalui penambahan tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana medis, optimalisasi jaminan kesehatan bagi warga binaan, serta penguatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan eksternal. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran warga binaan dan kebiasaan warga binaan guna mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Hak Kesehatan, Warga Binaan, Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN GUARANTEEING THE HEALTH RIGHTS OF INMATES**

***(Study at the Class I Correctional Institution of Bandar Lampung)***

**By**

**Yesicha Debora**

*Fulfillment of health rights for correctional inmates is part of human rights that must be guaranteed by the state, including for inmates serving sentences in correctional institutions. Correctional institutions not only function as places to serve sentences, but also as development institutions responsible for guaranteeing the basic rights of inmates, including the right to health services. In practice, the fulfillment of health rights for inmates still faces various obstacles, such as overcapacity, limited health workers, and minimal health service facilities and infrastructure. The problem in this study is how the role of Correctional Institutions in guaranteeing the health rights of inmates and what factors influence the implementation of this role in Class I Correctional Institution Bandar Lampung.*

*This study employs both normative legal and empirical legal research methods. The data used consists of primary data collected through field research, specifically interviews, as well as secondary data obtained from legislation, official documents, books, journals, and previous research findings. The informants in this study consisted of staff at the Bandar Lampung Class I Correctional Institution, prison health workers, inmates, and academics in the field of criminal law. Data analysis was conducted qualitatively by describing the data obtained and relating it to applicable legal provisions.*

*The research findings indicate that the role of the Bandar Lampung Class I Correctional Institution in ensuring the health rights of inmates has been carried out through normative, factual, and ideal roles, as outlined in Soerjono Soekanto's role theory. Normatively, the fulfillment of health rights is grounded in a clear legal basis through Law No. 22 of 2022 on Corrections and other relevant regulations. In practice, health services are provided through the operation of prison clinics, health examinations, the distribution of medications, promotive and preventive care, and a referral system to external healthcare facilities. Meanwhile, ideally, the Correctional Institution is expected to provide optimal, comprehensive health services that meet the same standards as those for the general public. However,*

**Yesicha Debora**

*implementation has not been optimal due to overcrowding of inmates, limited healthcare personnel, uneven coverage of health insurance, and limited healthcare facilities and infrastructure. Factors influencing the fulfillment of this role include legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, societal factors, and cultural factors, with facilities and infrastructure being the dominant factor.*

*The recommendations of this study are the need to improve the quality of health services at the Bandar Lampung Class I Correctional Institution by increasing the number of health workers, upgrading medical facilities and infrastructure, optimizing health coverage for inmates, and strengthening cooperation with external health facilities. Furthermore, it is necessary to raise inmates' awareness and improve their habits to support a more humane correctional system that is oriented toward the protection of human rights.*

**Keywords: Correctional Institution, Right to Health, Inmates, Corrections, Human Rights**